



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

KEPUTUSAN

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 52 TAHUN 2025

TENTANG

**TIM PELAKSANA LAYANAN PUBLIK PENGELOLAAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pelayanan publik pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan tim pelaksana kegiatan Layanan Publik Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya pembaruan nama anggota Tim Pelaksana Layanan Publik Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu dilakukan pembaruan daftar nama Tim Pelaksana Layanan Publik Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pelaksana Layanan Publik Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
 2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PELAKSANA LAYANAN PUBLIK PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Layanan Publik Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pelaksana Layanan Publik Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. mengumpulkan data Informasi Publik pada masing-masing Unit Organisasi Eselon II;
 - b. memperbarui Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan pada masing-masing Unit Organisasi Eselon II;
 - c. melakukan pengelolaan, pendokumentasian, dan penyediaan informasi pada masing-masing Unit Organisasi Eselon II;
 - d. berkoordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam menyusun dan merencanakan pelaksanaan persiapan pengujian konsekuensi Daftar Informasi Publik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);
 - e. berkoordinasi dengan PPID dalam melaksanakan kegiatan persiapan pengujian konsekuensi Daftar Informasi Publik LKPP;
 - f. berkoordinasi dengan PPID dalam melaporkan pelaksanaan kegiatan persiapan pengujian konsekuensi Daftar Informasi Publik LKPP;
 - g. berkoordinasi dengan PPID dalam melaksanakan evaluasi terhadap Informasi Publik yang telah dilakukan pengujian konsekuensi;
 - h. memberikan pembaruan informasi kegiatan/berita di masing-masing Unit Organisasi Eselon II kepada Tim Hubungan Masyarakat LKPP secara berkala; dan
 - i. bertindak sebagai penghubung jika ada permintaan informasi yang diterima oleh Tim Hubungan Masyarakat LKPP.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim Pelaksana

Layanan Publik Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi LKPP melakukan koordinasi dan konsultasi dengan unit organisasi di lingkungan LKPP, instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala LKPP.

KEEMPAT : Masa kerja Tim Pelaksana Layanan Publik Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi LKPP sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 203 Tahun 2024 tentang Tim Pelaksana Layanan Publik Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2025
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



Mustika Rosalina Putri

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM PELAKSANA
LAYANAN PUBLIK PENGELOLAAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 52 TAHUN 2025

TANGGAL : 21 April 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PELAKSANA LAYANAN PUBLIK PENGELOLAAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

No	Kedudukan Dalam Tim	Nama/Jabatan
1	Penanggung Jawab	: Sekretaris Utama
2	Ketua	: Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
3	Anggota	: 1. Yuni Alfianita 2. Mahendra Gilang Ramadhynara 3. Marvela Alfarosa Pardede 4. Winny Adlina Pratomo 5. Verawaty Simorangkir 6. Dahat Riswanto 7. Yogie Prastiyans 8. Muhammad Darwis Rambe 9. Philipus Pasang 10. Krens Jansen Kapitarauw 11. Zubaedah 12. Aziz Yuda Marwanto 13. Hima Tussafinah 14. Lingga Sakti

		<ol style="list-style-type: none">15. Nanda Faridah16. Sabri Alim17. Meita Amelia18. Alina Mahardhika Puspa19. Mutiah Risky20. Restituta Ema Berlian Sekarputri21. Lisa Pramita22. Muhammad Alief Hidayat23. Lutfi Prafidya Ferisa24. Desak Putu Ayunda Putri25. Fairuz Nawfal Hamid26. Masriana27. Euodia Putri Prastika
--	--	---

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI